ISBN 978-979-19423-8-6

PROSIDING SEMINAR

Penelitian Unggulan Departemen Agribisnis

Bogor, 27 - 28 Desember 2012

Editor :
Rita Nurmalina
Netti Tinaprilla
Amzul Rifin
Tintin Sarianti
Yanti N. Muflikh

DEPARTEMEN AGRIBISNIS
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Prosiding Seminar Penelitian Unggulan Departemen Agribisnis

Bogor, 27 - 28 Desember 2012

EDITOR :

Rita Nurmalina
Netti Tinaprilla
Amzul Rifin
Siti Jahroh
Popong Nurhayati

Departemen Agribisnis
Fakultas Ekonomi dan Manajemen - IPB

PROSIDING SEMINAR
PENELITIAN UNGGULAN DEPARTEMEN AGRIBISNIS
Bogor, 27 - 28 Desember 2012

TIM PENYUSUN

PENGARAH :
- Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS (Ketua Departemen Agribisnis)
- Dr. Ir. Dwi Rachmina, MS (Sekretaris Departemen Agribisnis)
- Dr. Ir. Anna Fariyanti, MS (Gugus Kendali Mutu FEM - IPB)

EDITOR :
- Ketua : Prof. Dr. Ir. Rita Nurmalina, MS
- Anggota : - Dr. Ir. Netti Tinaprilla, MM
  - Dr. Amzul Rifin, SP., MA
  - Tintin Sarianti, SP., MM
  - Yanti N. Muflikh, SP., M.Agribuss

TIM TEKNIS :
- Nia Rosiana, SP., M.Si

DESAIN DAN TATA LETAK :
- Hamid Jamaludin M., AMd

Diterbitkan Oleh :
DEPARTEMEN AGRIBISNIS
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Jl. Kamper Wing 4 Level 5 Kampus IPB Dramaga Bogor 16680
Telp/Fax : 0251-8629654
e-mail : depagribisnis@yahoo.com, dep-agribisnis@ipb.ac.id
Website : http://agribisnis.fem.ipb.ac.id

ISBN : 978-979-19423-8-6

KATA PENGANTAR

Salah satu tugas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan penelitian. Dalam rangka mendukung kegiatan penelitian bagi para dosen, Departemen Agribisnis telah melakukan kegiatan Penelitian Unggulan Departemen (PUD) yang dimulai sejak tahun 2011. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi bagi dosen Departemen Agribisnis untuk melakukan kegiatan penelitian sehingga dapat meningkatkan kompetensi di bidangnya masing-masing. Kegiatan PUD tersebut dimulai dari penilaian proposal yang akan didanai dan ditutup oleh kegiatan seminar. Selanjutnya untuk memaksimumkan manfaat dari kegiatan penelitian tersebut, hasil penelitian perlu didiseminasi dan digunakan oleh masyarakat luas. Salah satu cara untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian tersebut adalah dengan menerbtikan prosiding ini.

Prosiding ini berhasil merangkum sebanyak 23 makalah PUD yang telah diseminarkan pada tanggal 27-28 Desember 2012. Secara umum makalah-makalah tersebut dapat dibagi menjadi tiga bidang kajian, yaitu kajian Bisnis (9 makalah), Kewirausahaan (3 makalah), dan Kebijakan (11 makalah). Bidang kajian tersebut sesuai dengan Bagian yang ada di Departemen Agribisnis, yaitu Bagian Bisnis dan Kewirausahaan serta Bagian Kebijakan Agribisnis. Dilihat dari metode analisis yang digunakan, makalah yang terangkum dalam prosiding ini sebagian besar menggunakan analisis kuantitatif. Pesatnya perkembangan teknologi komputasi dan ketersediaan software metode kuantitatif mendorong para peneliti untuk memilih metode analisis tersebut. Ke depan metode analisis kajian bidang Agribisnis perlu diimbangi dengan metode analisis kualitatif.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir Rita Nurmalina, MS sebagai ketua tim PUD dan sekaligus sebagai Editor Prosiding ini beserta tim lainnya. Besar harapan kami prosiding ini dapat digunakan dan bermanfaat bukan saja di lingkungan kampus tapi juga bagi masyarakat luas.

Bogor, 1 Februari 2013
Ketua Departemen Agribisnis FEM IPB

Dr.Ir. Nunung Kusnadi, MS

DAFTAR ISI

KAJIAN BISNIS

Analisis Sikap Petani Terhadap Atribut Benih Unggul Jagung Hibrida di Sulawesi Selatan 1
Rita Nurmalina, Harmini, Asrul Koes, dan Nia Rosiana

Analisis Usaha Sayuran *Indigenous* Kemangi di Kabupaten Bogor..... 23
Anna Fariyanti

Analisis Kelayakan Usahaternak Sapi Perah Rakyat dan Pemasaran Susu di Jawa Timur (Studi Kasus Peternakan Sapi Perah di Kecamatan Pujon, Malang - Jawa Timur)..... 41
Harmini, Ratna Winandi Asmarantaka, Dwi Rachmina, dan Feryanto

Kelayakan Usaha Peternakan Sapi Perah dalam Menunjang Swasembada Susu di Indonesia..... 61
Juniar Atmakusuma

Kajian Sistem Pemasaran Produk Pertanian Organik dalam Rangka Menunjang Ketahanan Pangan dan Menuju Perdagangan Berkesetaraan (*Fair Trade*)..... 75
Tintin Sarianti, Juniar Atmakusuma, Heny Kuswanti Daryanto, Siti Jahroh, dan Febriantina Dewi

Pendapatan Usahatani dan Sistem Pemasaran Cabai Rawit Merah (Capsicum frutescens) di Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut..... 97
Rita Nurmalina, Asmayanti, dan Tubagus Fazlurrahman

Kelayakan Usaha Pembibitan Domba Melalui Program Kemitraan dan Inkubasi Bisnis dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bogor 117
Popong Nurhayati

Analisis Faktor dan Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Beras Organik Serta Analisis Pendapatan dan Risiko Produksi Padi Organik 137
Tintin Sarianti

Supply Chain Management Jambu Kristal pada Agribusiness Development Center-University Farm (ADC-UF) IPB 157
Yanti Nuraeni Muflikh

KAJIAN KEWIRAUSAHAAN

Analisis Faktor-Faktor Determinan Kewirausahaan Pertanian Padi Organik 177
Rachmat Pambudy, Burhanuddin, Arif Karyadi Uswandi, Yeka Hendra Fatika, Nia Rosiana, dan Triana Gita Dewi

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Negosiasi Wirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor 199
Yusalina

Metode Belajar Kewirausahaan di Institut Pertanian Bogor 215
Burhanuddin, dan Nia Rosiana

KAJIAN KEBIJAKAN

Analisis Keberlanjutan Lembaga Keuangan Mikro 235
Dwi Rachmina

Analisis Pengaruh Penerapan Bea Keluar pada Daya Saing Ekspor Kakao Indonesia 257
Amzul Rifin

Strategi Pengembangan Agribisnis Sapi Perah di Jawa Timur 273
Lukman Mohammad Baga

Kajian Stok Pangan Beras di Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan 295
Andriyono Kilat Adhi, Netti Tinaprilla, dan Maryono

Advokasi Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Bogor 313
Yusalina, Anna Fariyanti, Nunung Kusnadi, dan Yanti Nuraeni Muflikh

Peranan dan Analisis Pendapatan Koperasi Susu di Jawa Timur (Kasus Koperasi Peternak Sapi Perah SAE Pujon) 331
Ratna Winandi Asmarantaka

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pengguna Telepon Seluler Terhadap Pertumbuhan Sektor Pertanian 347
Rachmat Pambudy, dan Arif Karyadi Uswandi

Prospek Ekspor Produk Perikanan dan Kelautan ke Uni Eropa 357
Andriyono Kilat Adhi

Pengaruh Penerapan Teknologi Organik SRI (*System Rice Intensification*) Terhadap Penggunaan Sumber Modal Eksternal (Kasus Petani Padi di Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi) 377
Netti Tinaprilla

Dayasaing Usahaternak Sapi Perah Rakyat di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, Jawa Timur 403
Harmini dan Feryanto

Pengaruh Realisasi APBD Bidang Pertanian Terhadap Pertumbuhan Sektor Pertanian di Kabupaten Bogor 425
Arif Karyadi Uswandi

ANALISIS KEBERLANJUTAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Oleh:
Dwi Rachmina
Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB
dwirachmina@yahoo.com

ABSTRACT

Micro Finance Institution (MFI) plays an important role in solving credit rationing of Small and Medium Enterprises (SMEs). Koperasi Baytul Ikhtiar (KBI) is one of the Indonesian's MFI which has adopted Grameen Bank model. In 2009-2011, the growth of financing is 57 persen per year align with 37 persen per year growth of the number of member. However, the proportion of KBI equity capital decreased because of increasing liability. Due to the sustainability of institutional financing, it is important to analyze the KBI sustainability. The aims of this study are : (1) to describe KBI's performance in financing SMEs, and (2) to analyze KBI sustainability with the institutional financing and member perspective. This study collected data from KBI and 40 member of KBI who are spread in Dramaga, Taman Sari, and Rumpin district. The results show that KBI is sustained in term of institutional and membership, but not in financial. The financial viability of KBI is still negative within this three years. And yet, financial sustainability is very important to support KBI long term sustainability. Due to that, it is suggested that: (1) to improve the efficiency of Tenaga Pendamping Lapang (TPL), (2) to increase financial plafond for qualified member, and (3) to seek the source of financial with low proportion of profit sharing.

***Keywords** : sustainability, MFI, Cooperative Institution*

ABSTRAK

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sangat berperan dalam mengatasi masalah keterbatasan modal yang dihadapi usaha mikro dan kecil (UMK). Model Grameen Bank banyak diadopsi oleh LKM di Indonesia, diantaranya LKM Koperasi Baytul Ikhtiar (KBI). Pada periode 2009-2011, jumlah pembiayaan yang disalurkan mengalami pertumbuhan 57 persen per tahun sejalan dengan peningkatan jumlah anggota sebesar 37 persen per tahun. Namun, KBI mengalami penurunan proporsi modal sendiri akibat meningkatnya hutang. Berdasarkan uraian tersebut penting menganalisis keberlanjutan KBI jika dilihat dari keberlanjutan finansial, kelembagaan dan peserta atau anggota. Penelitian bertujuan (1) mendeskripsikan kinerja KBI dalam penyaluran pembiayaan kepada UMK, dan (2) menganalisis keberlanjutan KBI, dilihat dari keberlanjutan finansial, kelembagaan, dan peserta. Penelitian dilakukan pada level lembaga KBI dan pada level anggota KBI dengan jumlah sampel anggota 40 orang yang tersebar di Kecamatan Dramaga, Taman Sari dan Rumpin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KBI sudah memiliki keberlanjutan kelembagaan dan peserta, namun belum memiliki keberlanjutan finansial. Viabilitas finansial KBI masih negatif pada tiga tahun terakhir. Keberlanjutan finansial sangat penting untuk mendukung tercapainya keberlanjutan KBI dalam jangka panjang.Saran penelitian (1) meningkatkan efisiensi Tenaga Pendamping Lapang (TPL), (2) meningkatkan besar plafon pembiayaan kepada anggota yang berkualitas, dan (3) mencari sumber pendanaan dengan bagi hasil rendah

Kata kunci : Keberlanjutan, lembaga keuangan mikro, koperasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan guna mendukung perekonomian Indonesia. Kontribusi UMK terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cukup besar mencapai 43 persen dan mampu menyerap 95 persen tenaga kerja. Sekitar 50 persen UMK di Indonesia merupakan UMK sektor agribisnis.Menurut Wijono (2005), beberapa masalah yang masih dihadapi UMKM, yaitu: (1) kesulitan akses pada pasar produk, (2) pengembangan dan penguatan usaha masih lemah, (3) keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan, khususnya dari lembaga keuangan formal.Fasilitas pembiayaan dengan pendekatan konvensional perbankan sulit dijangkau UMK. termasuk UMK pertanian. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya pangsa kredit perbankan ke sektor pertanian, sekitar 7,5 persen pada tahun 2010 dan cenderung mengalami penurunan.

Keterbatasan akses UMK terhadap sumber pembiayaan formal, khususnya perbankan, mendorong UMK mrencari sumber pembiayaan lain, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM).LKM bersifat spesifik dan berfungsi sebagai lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta UMK. LKM memiliki karakteristik yang sesuai dengan UMK karena lebih fleksibel, mudah diakses karena persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan serta luwes pada pencairan kredit (Wijono, 2005). Salah satu bentuk LKM yang sesuai dengan karakteristik UMK yaitu koperasi.

Provinsi Jawa Barat menempati urutan ketiga dalam perkembangan jumlah koperasi aktif di Indonesia. Hingga tahun 2011, jumlah koperasi aktif di Jawa Barat mencapai 14.856 unit dan tercatat 769 unit diantaranya berada di Kota Bogor. Jumlah koperasi tersebut telah mengalami peningkatan sebesar 3,3 persen dari jumlah koperasi di Kota Bogor pada tahun 2009.Salah satu koperasi di Kota Bogor yang berperan sebagai LKM yaitu Koperasi Baytul Ikhtiar (KBI). KBI merupakan salah satu unit usaha Yayasan Pengembangan Masyarakat Mustadh'afiin (Peramu) yang bergerak dalam pelayanan simpan pinjam dengan basis pembiayaan *syariah* yang mengadopsi pola Grameen Bank.KBI sangat potensial sebagai lembaga intermediasi keuangan bagi UMK di perdesaan.

1.2. Perumusan Masalah

Koperasi Baytul Ikhtiar (KBI) memiliki jangkauan wilayah yang cukup luas, meliputi Kota dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjurdengan memiliki lima kantor unit. Jangkauan target sasaran KBI yaitu masyarakat perdesaan yang bertempat tinggal sekitar 12 km dari kantor unit dan kurang atau tidak akses terhadap lembaga keuangan formal. Jumlah anggota KBI terus mengalami peningkatan sekitar 37 persen per tahun pada tahun 2009-2011 (Tabel 1). Pada tahun 2011, anggota KBI mencapai 20.429 orang dengan total majelis mencapai 695 majelis.Sementara jumlah pembiayaan mengalami peningkatan lebih pesat, yaitu

57 persen per tahun. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah pembiayaan per anggota.

Tabel 1. Perkembangan Pembiayaan dan Anggota KBI Tahun 2009-2011

Uraian	Tahun			Growth (%/thn)
	2009	2010	2011	
Pembiayaan (Milyar Rp)	3.953	6.164	9.742	56,99
Jumlah Anggota (orang)	11.059	13.002	20.429	37,35

Sumber : Laporan Keuangan Koperasi Baytul Ikhtiar 2012

Seperti halnya sebagian besar LKM lainnya, KBI juga dihadapkan pada kendala operasional. Plafon pembiayaan yang dilayani relatif kecil, berkisar antara 300 ribu rupiah hingga 5 juta rupiah, sehingga menimbulkan biaya operasional yang cukup besar per transaksi.Besarnya biaya operasional pembiayaan usaha mikro mengharuskan KBI untuk melakukan perhitungan *break-even interest* secara cermat agar dalam jangka panjang dapat berlanjut. KBI dapat berlanjut secara finansial jika pendapatan dapat membiayai seluruh operasional KBI.

Peningkatan yang sangat besar pada realisasi pembiayaan (Tabel 1) menyebabkan KBI harus menyediakan dana yang cukup besar. Artinya struktur permodalan KBI, terutama modal sendiri, harus semakin kuat. Namun demikian, kondisi sebaliknya terjadi yaitu proporsi modal sendiri KBI pada tahun 2009-2011

mengalami penurunan sekitar 4 persen per tahun. Modal sendiri KBI bersumber dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana Latihan Wajib Kelompok (LWK), dana cadangan, hibah, sisa hasil usaha, dan modal penyertaan. Penurunan proporsi modal sendirikarena meningkatnya jumlah utang KBI. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran pembiayaan kepada anggota lebih banyak didanai dari modal luar dan mengakibatkan proporsi modal luar semakin tinggi (Gambar 1). Gambar 1 juga menunjukkan proporsi modal sendiri selain mengalami penurunan juga persentasenya sangat kecil yaitu tidak mencapai 20 persen.

Peningkatan modal luar mengakibatkan KBI harus mengeluarkan biaya modal kepada pihak ketiga. Sumber modal luar KBI berasal dari beberapa, yaitu (1) anggota Yayasan Peramu beserta lembaga binaannya, terdiri dari *Baitul Mal watTamwil* Khidmatul Ummah, Wihdatul Ummah, Tadbiirul Ummah, dan BPRS Bina Rahmah), (2) dana produktif mustahiq, (3) lembaga ESQ, (4) Gerakan Masyarakat Mandiri, dan (5) Bank Syariah Mandiri (BSM).Ketergantungan KBI kepada modal luar selain menimbulkan biaya modal juga akan mempengaruhi keberlanjutan KBI. Mengapa proporsi modal sendiri KBI masih rendah dan semakin menurun? Bagaimana viabilitas finansial KBI? Berdasarkan hal tersebut, maka kajian tentang keberlanjutan KBI dari aspek finansial menjadi penting untuk dilakukan. Selain keberlanjutan finansial, keberlanjutan lain yang harus ditinjau adalah dari sisi lembaga dan peserta atau anggota. Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini

yaitu bagaimana keberlanjutan KBI jika dilihat dari keberlanjutan finansial, kelembagaan dan peserta atau anggota?

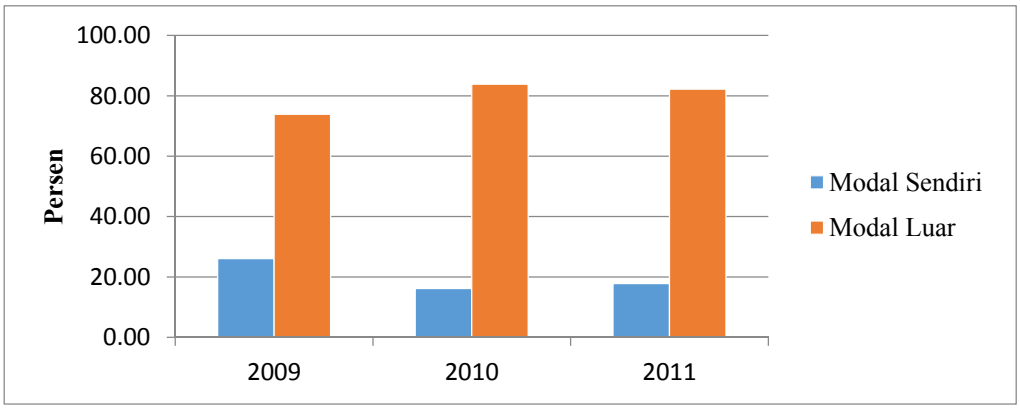

Sumber : Laporan Keuangan KBI 2009-2010

Gambar 1. Proporsi Modal KBI Tahun 2009-2011

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan kinerja KBI dalam penyaluran pembiayaan kepada UMK.
2. Menganalisis keberlanjutan lembaga keuangan mikro, dilihat dari keberlanjutan finansial, kelembagaan, dan peserta.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Pasar Kredit di Perdesaan

Kredit bagi petani memegang peranan penting. Petani yang mampu mengakses kredit dapat memanfaatkan usahanya untuk mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu Yunus (2007) menyatakan bahwa akses pada kredit adalah salah satu hak dasar manusia yang sangat fundamental (*fundamental human right*). Menurut Mosher (1966), untuk meningkatkan produksi petani dan membentuk struktur perdesaan yang progresif, perlu tersedia fasilitas kredit yang efisien dan mudah didapatkan (tetapi tidak berarti murah atau tingkat bunga rendah atau dengan subsidi pemerintah), sehingga mampu dikelola dengan baik dan dapat dikembalikan tepat waktu. Peranan kredit dalam pembangunan pertanian dan perdesaan bukan saja sebagai pelancar pembangunan tetapi juga unsur pemacu adopsi teknologi.

Pasar kredit di perdesaan merupakan "*imperfect market*" yang mengandung "*asymetri information*". Menurut pandangan ini, pasar kredit di perdesaan tersegmentasi menjadi kredit formal dan non formal dimana keduanya dapat berdampingan dengan karakteristik pasar masing-masing. Tingkat bunga kredit formal lebih rendah dari kredit non formal. Namun bunga tidak hanya ditetapkan oleh permintaan dan penawaran tetapi merupakan "*credit rationing*". Bunga kredit non

formal lebih tinggi karena jumlah *commercial lender* lebih sedikit. Permasalahan asimetri informasi pada pasar kredit perdesaan dapat menciptakan dua masalah klasik yaitu "adverse selections" dan "moral hazard" yang pada umumnya dapat dikurangi dengan melakukan (1) seleksi nasabah (*screening)*, (2) menciptakan sistem insentif, dan (3) *law emforcement*.

Menurut paradigma "*imperfect information"*, terdapat dua mekanisme untuk mengatasi permasalahan "*screening, incentives,* dan *enforcement*, yaitu (a) mekanisme tidak langsung (*indirect mechanism*) yaitu bunga merupakan harga dan insentif (*indirect screening*), dan (b) mekanisme langsung (*direct mechanism*) dengan cara melakukan seleksi langsung dan memonitor perilaku debitur.

2.2. Keberlanjutan Lembaga Keuangan Mikro

Merujuk pemikiran Khandker, Khaliliy, dan Khan (1995) yang diaplikasikan oleh Syukur (2002), bahwa keberlanjutan skim kredit berkaitan dengan tiga hal, yaitu (1) viabilitas finansial, (2) viabilitas kelembagaan atau manajerial, dan (3) viabilitas peserta (debitur). Viabilitas finansial berarti pendapatan dari kredit (bunga),dapat menutupi seluruh biaya operasi pada periode waktu tertentu.Viabilitas kelembagaan yaitu kelembagaan kredit (*delivery system*) dapat memberikan pelayanan secara berkelanjutan. Sementara viabilitas peserta (debitur) artinya keuntungan usaha yang dibiayai oleh kredit dapat menutup biaya kredit (bunga) dan pokok pinjaman.

2.2.1. Viabilitas Finansial

Keberlanjutan finansial (viabilitas finansial) adalah kemampuan sebuah lembaga pembiayaan yang melayani tabungan untuk mempertahankan atau meningkatkan aliran manfaat, serta menyalurkan melalui dana-dana yang diciptakan secara internal. Menurut *Consultative Group to Assist the Poor* (CGAP), berkelanjutan adalah kemampuan penyedia keuangan mikro untuk menutupi seluruh biaya yang diperlukan. Kemampuan tersebut memungkinkan keberlanjutan operasional penyedia keuangan mikro dan penyediaan jasa keuangan. Mencapai keberlanjutan finansial artinya mengurangi biaya transaksi, menawarkan produk dan jasa lebih baik dan sesuai kebutuhan pelanggan, dan menemukan cara-cara baru untuk menjangkau masyarakat miskin yang belum mendapatkan pelayanan dari bank.

2.2.2. Viabilitas Kelembagaan

Viabilitas kelembagaan berkaitan dengan sejauhmana viabilitas finansial dan viabilitas peserta dapat tercapai. Dalam upaya menjamin agar lembaga kredit dapat *viable* secara institusi, maka pembiayaan yang dilakukan harus memiliki prosedur atau mekanisme *delivery system* yang telah melembaga dan dapat menjamin berlangsungnya suksesi manajemen dan administrasi, serta tidak bergantung pada figur personal tertentu dalam mengelola pembiayaan. Beberapa hal terkait dengan *delivery system* yaitu (Khandker, Khaliliy, dan Khan, 1995): (a) persyaratan pinjaman, (b) kerumitan pengajuan pinjaman, (c) lama waktu pengajuan dan realisasi pinjaman, (d) fleksibilitas penggunaan pinjaman, (e) sistem monitoring pinjaman, (f) sistem pembukuan pinjaman

dan tabungan, (g) sistem insentif dan *punishment*. Selain itu, analisis kelembagaan skim kredit dapat didekati dari ketiga masalah utama yang sangat menentukan dalam perkreditan, yaitu *screening, incentive*, dan *enforcement.*

2.2.3. Viabilitas Peserta

Viabilitas peserta adalah ukuran penting dalam mempengaruhi keberlanjutan suatu pembiayaan dan menempati posisi yang sangat kritikal (Khandker, Khaliliy, dan Khan, 1995). Ukuran yang digunakan yaitu (1) terjadinya akumulasi kapital yang dapat diproksi dari kenaikan tabungan selama kurun waktu tertentu; (2) tingkat tunggakan rendah selama periode tertentu juga digunakan sebagai indikasi terjadinya viabilitas peserta. Dengan tingkat tunggakan yang rendah, pinjaman dan tabungan yang semakin meningkat menunjukkan terjadinya viabilitas peserta.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Koperasi Baytul Ikhtiar (KBI) yang berdomisili di Komplek Pertanian Jl. Siaga No. 25 RT 02 RW 10, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Pemilihan lokasi secara *purposive* dengan pertimbangan KBI merupakan salah satu LKM koperasi berbasis syariah yang menerapkan pola Grameen Bank. Waktu penelitian selama lima bulan, mulai Bulan Mei hingga November 2012.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Data utama yang dikumpulkan yaitu data primer pada tingkat lembaga KBI dan tingkat usaha anggota (peserta). Pengumpulan data dengan cara mewawancara sampel anggota dan informan dengan menggunakan alat bantu kuesioner dan cek list. Sumber informasi utama yaitu pihak manajemen, Tenaga Pendamping Lapang (TPL) dan anggota KBI. Pada lembaga KBI dikumpulkan data keuangan, anggota, dan data pendukung lainnya. Data keuangan yang dikumpulkan untuk tahun 2009- 2011.

Pada tingkat anggota dikumpulkan data usaha, data keuangan, data pinjaman, dan data pemanfaatan pinjaman. Jumlah anggota yang akan diwawancara sebanyak 40 sampel anggota di Kecamatan Dramaga, Taman Sari, dan Rumpin. Pemilihan sampel dilakukan secara bertahap dengan kriteria anggota yang memiliki usaha agribisnis, baik usaha *on farm* maupun *off farm*. Pemilihan sampel dimulai dengan menyusun kerangka sampel berdasarkan hasil pendataan seluruh anggota majelis yang memiliki usaha agribisnis dan mendapat pembiayaan dari KBI. Berdasarkan hasil pendataan terdapat 74 anggota yang memiliki usaha agribisnis dan memperoleh pembiayaan dari KBI. Pemilihan sampel secara acak pada masing-masing kecamatan sehingga diperoleh sebaran sampel sebanyak 14 orang di Kecamatan Taman Sari, 14 orang di Kecamatan Dramaga, dan 12 orang di Kecamatan Rumpin.

3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif untuk mendeskripsikan gambaran umum KBI, serta menganalisis viabilitas kelembagaan dan viabilitas peserta. Analisis kuantitatif untuk menganalisis viabilitas finansial. Analisis viabilitas finansial, kelembagaan, dan peserta merupakan tiga indikator untuk menganalisis keberlanjutan LKM KBI.

Analisis viabilitas finansial menggunakan analisis *break-even point* (BEP). Kondisi *break event point* atau kondisi impas tercapai apabila total penerimaan (TR) sama dengan total biaya (TC) atau disebut juga mengalami keuntungan normal. Seperti menurut Khandker, Khaliliy, dan Khan (1995) bahwa viabilitas finansial merupakan kondisi dimana pendapatan skim kredit (bunga) dapat menutupi seluruh biaya operasional penyelenggaraan skim kredit tersebut. Secara matematis kondisi viabilitas finansial dinyatakan sbb:

$$r \geq \frac{(i + \alpha + \rho)}{1 - \rho}$$

dimana :
r = tingkat bunga per unit pinjaman,
i = biaya untuk mendapatkan pokok pinjaman,
α = biaya administrasi dan supervisi,
ρ = *financial loss* per unit pinjaman.

Viabilitas finansial, selain harus memenuhi persamaan tersebut juga harus teruji secara terus menerus. Keberlanjutan finansial tercapai apabila KBI mencapai viabilitas finansial dalam jangka waktu yang lama dan cenderung semakin meningkat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Struktur Organisasi KBI

KBI sebagai LKM berbasis syariah baru berbadan hukum tahun 2008, walaupun secara operasional sudah beroperasi sejak tahun 1999. Kegiatan utama KBI yaitu program pemberdayaan masyarakat miskin melalui Unit Pelayanan Keuangan (UPK) Ikhtiar yang dimulai di wilayah perdesaan di Kecamatan Taman Sari.KBI merupakan bagian dari kegiatan Yayasan Peramu.Visi KBI yaitu menjadi organisasi keuangan mikro syariah yang memberdayakan masyarakat miskin melalui pelayanan simpan pinjam, pendidikan, dan pengorganisasian perempuan dari keluarga miskin. Sedangkan misi KBI yaitu:(a)memperluas jangkauan pelayanan keuangan mikro syariah kepada masyarakat miskin, (b) melakukan pendampingan dan pelayanan kelompok yang terorganisir, (c) membangun jaringan dengan NGO, Lembaga Amil Zakat (LAZ), LKM, pemerintah, swasta, dan perorangan untuk memperkuat pelayanan dan pendampingan

Struktur organisasi KBI memiliki unsur tertinggi yaitu rapat anggota. Pengelola KBI terdiri dari pengawas dan pengurus. Pengawas KBI terdiri dari seorang ketua dan

dua orang anggota, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan KBI. Pengurus KBI terdiri dari ketua, wakil ketua, dan dua orang sekretaris, yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pengendalian usaha KBI. KBI memiliki seorang direktur yang membawahi enam divisi, yaitu Divisi Usaha, Divisi Human Resource Development (HRD), Divisi Audit, Divisi Humas dan Kesekretariatan, Divisi Research & Development (R&D), dan Divisi Informasi dan Teknologi (IT). Semua divisi, kecuali Divisi Audit, saling berkoordinasi dalam operasional program KBI. Khusus pada Divisi Usaha terdapat Unit Simpan Pinjam yang dipimpin oleh seorang manager. Manager Simpan Pinjam dibantu oleh dua orang kepala bagian (kabag), yaitu Kabag Keuangan dan Kabag Operasional. Kabag Keuangan dibantu oleh 71 orang TPL. Kabag operasional dibantu oleh staf bagian administrasi, bagian kas, dan bagian pembukuan. TPL merupakan ujung tombak KBI yang berinteraksi langsung dengan para anggota.

Anggota KBI dibedakan menjadi anggota koperasi dan anggota layanan koperasi. Anggota koperasi yaitu anggota yang berperan sebagai pemilik. Sebagai pemilik, setiap anggota berkewajiban menyetor modal dan mengawasi jalannya KBI. Anggota layanan KBI yaitu anggota yang hanya sebagai pengguna jasa layanan KBI dan memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif memanfaatkan layanan KBI.

4.2. Program Pelayanan Keuangan Koperasi Baytul Ikhtiar (KBI)

Program utama KBI yaitu program pelayanan keuangan berupa simpan pinjam dan pemberdayaan masyarakat miskin, khususnya kaum wanita, di perdesaan melalui Unit Pelayanan Keuangan (UPK) Ikhtiar pada tahun 1999. Tahun 2002, implementasi program diperluas ke kawasan miskin Kota Bogor dan tahun 2003 juga dimanfaatkan oleh kelompok pedagang sayuran di Pasar Jambu Dua Kota Bogor. Program UPK Ikhtiar bertujuan membangun kapasitas sosial dan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah agar memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar melalui pengelolaan aset ekonomi rumah tangga. Pola program UPK Ikhtiar merupakan replika dari pola *grameen bank* yaitu melalui pendekatan kelompok kaum perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah.

Wilayah pelayanan program UPK Ikhtiar cukup luas, meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Sebelum implementasi program UPK Ikhtiar di suatu wilayah, dilakukan serangkaian tahapan kegiatan untuk menjamin pemilihan wilayah dan masyarakat yang tepat.Tahapan kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) tahap persiapan, (2) tahap persiapan operasional pelayanan, dan tahap rekruitmen anggota (Gambar 2). Tahap operasionalisasi pelayanan meliputi persiapan sistem komputerisasi palayanan (Sirkah), aktivitas pembekalan metode monitoring kelompok, training dan identifikasi kemiskinan, serta review pelayanan.

Pembiayaan yang dilayani KBI meliputi pembiayaan untuk konsumsi maupun produktif. Pembiayaan konsumsi antara lain untuk memenuhi kebutuhan rutin rumahtangga, membayar utang, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan.Pembiayaan

produktif untuk tambahan modal kerja dan atau investasi. Sebagian besar (53%) pembiayaan KBI untuk tujuan konsumsi dengan kecenderungan meningkat. Sementara pembiayaan produktif, sebagian besar diserap oleh usaha perdagangan (35%), termasuk perdagangan hasil pertanian. Pembiayaan untuk usaha pertanian (*on farm*) relatif sedikit (4,8% tahun 2009, 6,8% tahun 2010, dan 6% tahun 2011), namun cenderung meningkat lambat (0,6 % per tahun) pada periode 2009-2011. Demikian halnya pembiayaan untuk usaha industri masih rendah. Usaha yang paling sedikit mendapat pelayanan pembiayaan KBI yaitu usaha jasa.

Pada usaha pertanian (*on farm*), pembiayaan KBI digunakan untuk modal kerja dan investasi. Pembiayaan modal kerja meliputi pembelian input produksi, seperti bibit, pupuk, obat-obatan, dan jasa tenaga kerja. Pembiayaan modal investasi digunakan untuk pengadaan alat-alat pertanian atau pembangunan tempat usaha. Usaha pertanian yang dilakukan para anggota beragam, yaitu usahatani tanaman (padi, jagung, umbi-umbian, sayur-mayur), usaha peternakan (kambing, sapi, dan ayam), dan usaha perikanan. Sementara usaha perdagangan meliputi perdagangan sayur, daging maupun ayam, serta sembako.

4.3. Keberlanjutan Lembaga Keuangan Mikro KBI

Keberlanjutan (viabilitas) LKM KBI meliputi tiga indikator yaitu keberlanjutan finansial, keberlanjutan kelembagaan, dan keberlanjutan peserta.

4.3.1. Keberlanjutan Kelembagaan

Keberlanjutan kelembagaan merupakan syarat tercapainya keberlanjutan finansial dan keberlanjutan peserta. Kriteria kualitatif untuk mengukur keberlanjutan kelembagaan, yaitu: (1) memiliki prosedur atau mekanisme sistem penyaluran yang melembaga dan menjamin berlangsungnya suksesi manajemen dan administrasi, (2) tidak bergantung pada figur personal tertentu dalam mengelola pembiayaan.

1. Prosedur dan Mekanisme Pembiayaan pada Koperasi Baytul Ikhtiar

Untuk menjamin keberlanjutan kelembagaan pembiayaan yang mengadopsi pola *Grameen Bank*, KBI telah memiliki prosedur dan mekanisme yang mudah diaplikasikan (*aplicable*), transparan (*transparent*), dan akuntabel (*accountable*). Prosedur dan mekanisme yang dijalankan KBI memiliki tahapan kegiatan yang terencana, selektif, tetapi tidak mempersulit, yang terbagi menjadi dua, yaitu: (1) tahap persiapan operasional pelayanan, dan (2) tahap rekruitmen anggota (Gambar 2).

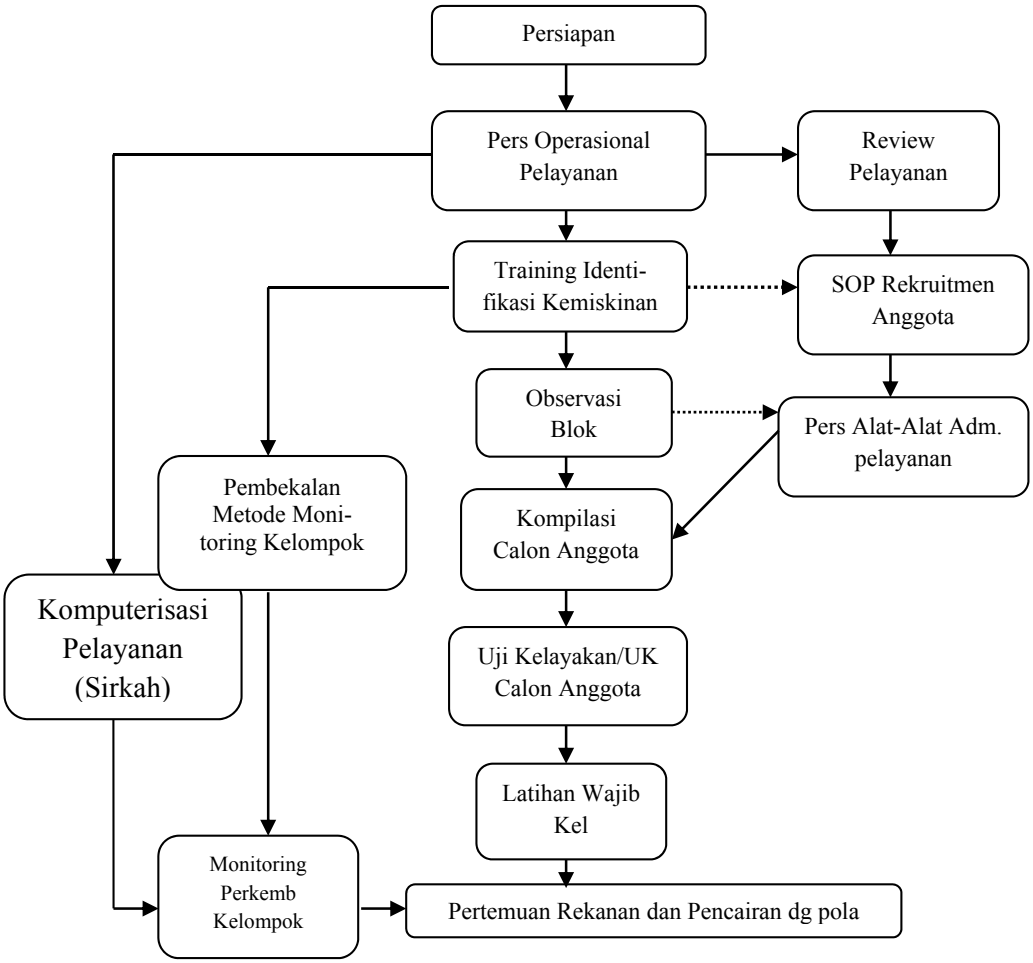

Sumber : Koperasi Baytul Ikhtiar 2012

Gambar 2. Tahapan Program Unit Pelayanan Keuangan (UPK) Ikhtiar Pada Koperasi Baytul Ikhtiar

Tahap persiapan operasionalisasi pelayanan meliputi persiapan sistem komputerisasi palayanan (Sirkah), kegiatan pembekalan metode monitoring kelompok, training dan identifikasi kemiskinan, serta review pelayanan. Setelah selesai tahap persiapan, dilakukan tahap rekruitmen anggota. Tahap ini dimulai dengan tahap observasi blok-blok pemukiman dan kompilasi data calon anggota. Setelah tahap kompilasi data calon anggota, setiap anggota akan melalui tahap uji kelayakan (UK) yang dilakukan oleh komite penentuan calon anggotaberdasarkan kriteria yang ditentukan KBI. Calon anggota yang lulus tahap UK harus mengikuti Latihan Wajib Kelompok (LWK) selama tiga hari berturut-turut yang bertujuan untuk melihat karakter calon anggota, dalam hal kedisiplinan dan kepribadiannya sebagai anggota majelis. Setelah lulus LWK, calon anggota disahkan menjadi anggota pada kegiatan Rapat

Anggota Tahunan (RAT) KBI. Anggota terpilih akan dikelompokkan dalam suatu majelis berdasarkan kedekatan tempat tinggal. Setiap majelis beranggotakan 15-25 orang, dan setiap desa terdapat 6-10 majelis. Setiap anggota harus mengikuti pertemuan majelis satu kali dalam seminggu atau disebut pertemuan mingguan. Selain itu ada pertemuan blok dan pertemuan kader. Pertemuan blok dilakukan per desa dan wajib dihadiri oleh tiga orang perwakilan dari setiap majelis. Sementara pertemuan kader yang dihadiri oleh perwakilan dari setiap blok.

Majelis-majelis melakukan kegiatan rutin mingguan pada hari tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan tidak bentrok dengan majelis lain. Setiap pertemuan dilangsungkan di rumah ketua majelis atau salah satu anggota majelis selama sekitar satu jam. Dalam satu desa terdapat beberapa majelis, sehingga waktu pertemuan diatur sehingga setiap majelis secara berurutan melakukan pertemuan yang dihadiri anggota dan TPL. Kegiatan pertemuan majelis yaitu menyetor dan menarik tabungan, mengajukan dan realisasi pinjaman, serta pembayaran pinjaman.

Selain prosedur, beberapa ketentuan yang diadopsi dan dimodifikasi dari *Grameen Bank* untuk menjamin keberlanjutan kelembagaan, yaitu: (1) ketentuan majelis, (2) ketentuan pengajuan pembiayaan, (3) ketentuan penyaluran atau pencairan pembiayaan, (4) ketentuan angsuran pembiayaan, dan (5) persyaratan pembiayaan.

2. Ketentuan Majelis dalam Program UPK Ikhtiar

a Majelis merupakan kelompok anggota layanan koperasi yang berjumlah 15-25 anggota. Majelis dibentuk berdasarkan wilayah tempat tinggal.

b Setiap kelompok memiliki ketua majelis yang disepakati oleh seluruh anggota majelis dan ketua bertanggung jawab terhadap anggotanya.

c Setiap pertemuan majelis harus selalu diawali dengan membaca ikrar yang dipimpin oleh ketua majelis. Bunyi Ikrar anggota majelis sebagai berikut :

"Ikrar Anggota Majelis Ikhtiar"

1) Adalah menjadi tanggung jawab kami untuk berusaha menambah pendapatan keluarga.
2) Membantu anggota kelompok atau majelis apabila mereka dalam kesulitan.
3) Menggunakan pinjaman dari majelis ikhtiar Koperasi Baytul Ikhtiar untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
4) Mendorong anak-anak untuk terus bersekolah.
5) Membayar kembali pembiayaan dan menabung setiap minggu atau sesuai ketentuan.
6) Allah SWT menjadi saksi atas apa yang kami ucapkan dan kami lakukan.

d Setelah anggota membacakan ikrar, dilanjutkan dengan ikrar TPL.

3. Ketentuan Pengajuan Pembiayaan

Bagi anggota yang mau mengajukan pembiayaan, harus mengikuti proses pengajuan pembiayaan pada KBI, sebagai berikut:

a. Pengajuan pembiayaan oleh anggota dilakukan dalam pertemuan mingguan majelis dan harus mendapat persetujuan anggota lainnya. Hal ini dilakukan

karena apabila dalam pembayaran angsuran anggota tersebut mengalami kesulitan, maka anggota lainnya wajib untuk membantu anggota tersebut secra tanggung renteng.

b. TPL mengisi formulir pengajuan pembiayaan anggota (form MAP) yang berisikan data diri, kondisi finansial anggota, peruntukan dan alokasi pembiayaan.
c. Pengajuan pembiayaan diproses oleh komite uji kelayakan yang terdiri dari supervisor, manager unit, dan staf senior penumbuhan (asisten supervisor). Komite menentukan plafon pembiayaan yang diberikan kepada anggota.

4. Ketentuan Penyaluran atau Pencairan Pembiayaan

a. Setelah disetujui komite, maka pencairan pembiayaan dilakukan pada pertemuan majelis minggu berikutnya.
b. Transaksi pembiayaan antara TPL dengan anggota dilakukan dengan pembacaan akad oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh seluruh anggota majelis. Setelah kedua pihak sepakat mengenai besarnya jumlah yang harus diangsur tiap minggu, kedua belah pihak menandatangani lembar persetujuan pembiayaan.

5. Ketentuan Angsuran Pembiayaan

a. Angsuran pembiayaan dibayarkan setiap minggu pada saat pertemuan majelis dalam jangka waktu 50 minggu.
b. Angsuran terdiri dari angsuran pokok, angsuran marjin, tabungan wajib, tabungan cadangan, dan tabungan kelompok. Angsuran pokok berkisar antara Rp 6.000,- hingga Rp 100.000,-, sedangkan angsuran marjin pembiayaan sesuai kesepakatan pada saat akad. Tabungan wajib, cadangan, dan kelompok besarnya akan semakin meningkat sesuai dengan plafon pembiayaan yang diterima anggota, sebagai contoh pada plafon pembiayaan Rp 500.000,- akan ditetapkan tabungan wajib sebesar Rp 200,-, tabungan cadangan Rp 500,-, dan tabungan kelompok Rp 300,-.
c. Tabungan wajib dan tabungan kelompok akan dikembalikan kepada anggota apabila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Tabungan cadangan akan dikembalikan kepada anggota setelah anggota memenuhi kewajiban angsurannya.

Ketentuan KBI ditetapkan atas dasar prinsip *Grameen Bank* (Zain *dalam* Thoha, 2000), yaitu: (1) bantuan kredit tanpa jaminan (agunan) dan atau penjamin; (2) tidak ada sangsi hukum bila anggota tidak bisa mengembalikan pinjaman dan kredit tersebut dihibahkan bila anggota meninggal dunia, (3) anggota tidak perlu datang ke kantor untuk mengurus pinjamannya, tetapi petugas yang mendatangi anggota dalam pertemuan majelis, dan (4) prosedur perkreditan sederhana tanpa menggunakan banyak formulir yang tidak dimengerti oleh anggota.

6. Manajemen Organisasi Pembiayaan

Selain ketentuan dan prosedur yang jelas, untuk menjamin keberlanjutan kelembagaan, KBI telah mempersiapkan wadah organisasi. Struktur organisasi disusun sebagai alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan KBI. Jika dilihat dari struktur organisasi, maka KBI sudah menerapkan manajemen modern dengan adanya divisi dan bagian-bagian yang memiliki tugas dan fungsi yang jelas.Namun demikian, hubungan antar unsur dalam struktur organisasi lebih bersifat kolegial dan kekeluargaan tanpa birokrasi yang terlalu rigid antar atasan dan bawahan.

Berdasarkan pola manajemen organisasi KBI, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan tidak bergantung pada figur personal tertentu, melainkan dapat dilakukan secara kolektif koordinatif. Pola kolektif koordinatif diperkuat dengan adanya ketentuan yang sederhana dan mudah diaplikasikan, serta didukung oleh sumberdaya yang memiliki integritas dan komitmen yang tinggi.

Berdasarkan kriteria prosedur dan mekanisme serta manajemen organisasi, maka dapat disimpulkan KBI memiliki keberlanjutan kelembagaan. Keberlanjutan kelembagaan ini sangat penting untuk menjamin keberlanjutan program pembiayaan.

4.3.2. Keberlanjutan Finansial

Keberlanjutan (viabilitas) finansial adalah kondisi pendapatan atau marjin pembiayaan dapat menutup seluruh biaya operasional.KBI dapat dikategorikan *viable* apabila marjin pembiayaan lebih besar dari pada biaya operasional. Biaya operasional meliputi *financial loss* yaitu cadangan penghapusan piutang atas tunggakan pembayaran (ρ), biaya untuk mendapatkan pokok pinjaman (i), serta biaya administasi dan supervisi (α). Sebelum mengukur viabilitas finansial KBI, perlu diuraikan masing-masing komponennya,yaitu pendapatan dan biaya operasional KBI.

1. Pendapatan, Beban, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) KBI

Pendapatan KBI dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional (Tabel 2). Pendapatan operasional terdiri dari (1) pendapatan marjin pembiayaan (PYD), (2) pendapatan sindikasi, (3) pendapatan dana sasarengan, (4) pendapatan jasa pelayanan, (5) pendapatan bagi hasil rekening bank, (6) jasa administrasi pembiayaan, dan (7) jasa administrasi tabungan. Sedangkan pendapatan non operasional KBI berasal dari (1) pendapatan sewa, (2) laba penjualan aktiva tetap, (3) support biaya kegiatan, dan (4) pendapatan non operasional lainnya. Tabel 2 menunjukkan kontribusi pendapatan operasional terhadap total pendapatan KBI sangat dominan (97%) dan pendapatan non operasional sangat kecil (3%).

Tabel 2 menunjukkan pendapatan operasional KBI naik pesat mencapai 52 persen per tahun yang disebabkan peningkatan seluruh sumber pendapatan, kecuali bagi hasil rekening bank. Peningkatan terbesar pada pendapatan jasa administrasi tabungan dan pendapatan marjin pembiayaan (PYD). Pendapatan marjin pembiayaan memiliki pengaruh lebih besar karena memberi kontribusi 77 persen, sementara kontribusi pendapatan jasa administrasi tabungan sangat kecil (1%).

Tabel 2. Pendapatan KBI menurut Sumber Pendapatan Tahun 2009 – 2011

Sumber Pendapatan	2009	2010	2011	Laju (%/th)
		Pendapatan Operasional		
Pendapatan PYD	733.869.888	1.218.179.451	1.918.236.999	61,73
Pendapatan Sindikasi	5.309.600	-		
Pendapatan Dana sasarengan	48.695.900	56.583.250	57.175.015	8,62
Pendapatan Jasa Pelayanan	56.911.112	55.983.974	62.683.205	5,17
Bagi Hasil Rek. Bank	58.548.394	29.094.947	40.401.647	(5,72)
Jasa Administrasi Pembiayaan	40.673.000	61.838.100	97.707.500	55,02
Jasa ADM Tabungan	3.648.000	5.555.000	18.085.564	138,92
Total Pendapatan Operasional	947.655.894	1.427.234.722	2.194.289.930	52,18
		Pendapatan Non Operasional		
Pendapatan Sewa	840.000	870.000	100.000	(42,47)
Laba Penjualan Aktiva Tetap	3.090.000	-	-	
Support Biaya Kegiatan	13.764.050	-	-	
Pend. non operasional lain	7.255.260	1.559.000	28.942.416	838,98
Total Pend. Non Operasional	24.949.310	2.429.000	29.042.416	502,69
Total Pendapatan KBI	**972.605.204**	**1.429.663.722**	**2.223.332.346**	**51,25**

Beban KBI juga terdiri daribeban operasional danbeban non operasional. Proporsi beban operasional sangat dominan yaitu mencapai 97 persen (Tabel 3).

Tabel 3. Perkembangan Beban KBI menurut Jenis Beban Tahun 2009-2011

Jenis Biaya	2009	2010	2011	Laju (%/th)
		Beban Operasional		
Beban Bagi Hasil PY DIT	65.256.585	73.655.540	412.417.770	236,40
Beban Gaji/Honor	517.916.194	796.622.165	1.104.902.028	46,26
Beban TK Lainnya	45.302.550	54.115.350	73.392.788	27,54
Beban ASKES	14.778.604	31.041.299	36.552.106	63,90
Beban DPLK	4.403.801	7.753.802	25.858.175	154,78
Beban Tunjangan Pendidikan/PSDM	20.577.600	19.200.000	21.145.480	1,72
Beban Sewa	208.333	14.866.669	11.616.670	3.507,08
Beban Pajak	10.911.845	12.783.153	11.191.959	2,35
Beban Pemel&Perbaikan	5.192.087	33.005.504	31.275.391	265,22
Beban Perlengkapan Kantor	11.593.750	15.348.100	10.393.162	0,05
Beban CPP	7.470.011	21.684.358	4.500.000	55,52
Beban Peny. Inventaris	18.304.808	36.403.063	91.405.034	124,98
Beban Penyusutan Gedung	-	12.942.856	35.302.372	172,76
Beban Rekening Kantor	17.168.696	10.689.703	17.494.547	12,96
Beban Rupa2 Persediaan	13.966.155	23.074.780	44.035.496	78,03
Beban Akomodasi & Transp	57.453.150	61.077.700	93.014.100	29,30
Beban Jasa Pihak Lain	2.406.600	4.542.200	7.621.598	78,27

Tabel 3. Perkembangan Beban KBI menurut Jenis Beban Tahun 2009-2011 (lanjutan)

Jenis Biaya	2009	2010	2011	Laju (%/th)
Beban Umum & Adm Lain	4.269.760	10.900.765	42.168.751	221,07
Beban Ev. & Perencanaan	43.853.233	21.215.851	43.985.387	27,85
Beban Pengemb. Wilayah	-	7.078.999	-	-
Total Beban Operasional	861.033.762	1.268.001.857	2.118.272.813	57,16
		Beban Non Operasional		
Sumbangan- Sumbangan	4.773.000	8.353.100	4.514.300	14,53
Kegiatan/Pendampingan	13.220.505	28.349.166	15.797.883	35,08
Beban Non Operasi Lainnya	-	-	14.478.713	-
Total Beban Non Operasional	17.993.505	36.702.266	34.790.896	49,38
Total Beban KBI	79.027.267	**1.304.704.123**	**2.153.063.709**	**56,72**

Hal ini sejalan dengan kontribusi pendapatan yang mencapai 97 persen. Laju peningkatan beban operasional lebih tinggi (57%) dibandingkan laju peningkatan pendapatan operasional (52% per tahun). Kondisi ini dalam jangka panjang kurang baik karena akan menghasilkan laba yang cenderung menurun. Jika diamati menurut jenis biaya, kontribusi biaya operasional terbesar yaitu biaya beban gaji atau honor (kisaran 50- 60 %). Sementara beban bagi hasil PYD menempati urutan kedua dengan kisaran 5-20 persen. Beban gaji atau honor, selain paling dominan, juga mengalami peningkatan yang relatif besar (46% per tahun). Peningkatan beban gaji/honor ini karena penambahan TPL sejalan dengan peningkatan jumlah anggota.

Beban operasional lain yang meningkat pesat, walaupun proporsinya relatif kecil, yaitu beban sewa mencapai 3500 persen per tahun. Peningkatan yang sangat tajam disebabkan adanya sewa tempat mulai tahun 2010. Sewa tempat ini tidak dapat dihindarkan karena diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan KBI. KBI memiliki kantor pusat di Jalan Loji Sindangbarang Bogor. Selain itu, pada setiap kecamatan terdapat kantor cabang sebagai tempat penyelenggaraan administrasi maupun tempat para TPL berkumpul sebelum dan sesudah melaksanakan tugas.

Berdasarkan uraian pendapatan dan beban (Tabel 2 dan 3), maka dapat diketahui sisa hasil usaha (SHU) KBI periode tahun 2009-2011 (Tabel 4). KBI memperoleh SHU positif, namun dengan kecenderungan menurun (5% per tahun). Penurunan SHU disebabkan laju peningkatan pendapatan lebih rendah dari laju peningkatan beban. Kondisi seperti ini dalam jangka panjang kurang aman sehingga KBI harus segera mengidentifikasi sumber peningkatan beban yang dapat dihindarkan. Apabila dikaitkan dengan jumlah anggota yang dilayani (Tabel 1), maka SHU per anggota cenderung menurun sekitar 25 persen per tahun (Tabel 4). Artinya , penambahan jumlah anggota berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam pengelolaan KBI. Hal ini dimungkinkan karena adanya peningkatan beban yang belum seimbang pemanfaatannya.

Tabel 4. Pendapatan, Beban, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) KBI Tahun 2009-2011

Uraian	Tahun			Growth (%/th)
	2009	2010	2011	
Pendapatan (Rp)	972.605.204	1.429.663.722	2.223.332.346	51,25
Biaya (Rp)	879.027.267	1.304.704.123	2.153.063.709	56,72
SHU (Rp)	93.577.937	124.959.599	70.268.637	-5,12
SHU/Anggota (Rp)	8.462	9.611	3.440	-25,32

Sumber : Laporan Laba Rugi Koperasi Baytul Ikhtiar Tahun 2009-2011 (diolah)

2. Viabilitas Finansial

Berdasarkan informasi laporan keuangan, maka dapat dihitung viabilitas finansial pembiayaan KBI selama periode 2009-2011 (Tabel 5). Kondisi finansial dikatakan *viable* apabila marjin pembiayaan (r) lebih besar dari beban pembiayaan $(i+\alpha+\rho)/(1-\rho)$. Marjin pembiayaan diperoleh dari rasio pendapatan PYD terhadap total pembiayaan yang disalurkan. Sedangkan beban pembiayaan terdiri dari biaya pokok pinjaman (i), biaya administrasi dan supervisi (α) dan *financial loss* (ρ). *Financial loss* merupakan beban tunggakan pembayaran pembiayaan. Beban pembiayaan tersebut merupakan rasio beban pembiayaan terhadap total pembiayaan. Total pembiayaan pada periode 2009 – 2011 mengalami peningkatan cukup besar (57% per tahun), yaitu dari 3,9 milyar rupiah tahun 2009 menjadi 9,7 milyar rupiah tahun 2011.

Tabel 5. Viabilitas Finansial KBI Tahun 2009-2011

Tahun	ρ	α	I	Hasil Bagi (i+α+ρ)/(1- ρ)	Marjin (r)	Selisih (7=6-5)	Viabilitas
1	2	3	4	5	6	7	8
2009	0,006	0,090	0,122	0,219	0,185	-0,033	Tidak Viabel
2010	0,007	0,108	0,036	0,153	0,197	0,044	Viabel
2011	0,002	0,096	0,110	0,209	0,196	-0,012	Tidak Viabel
Rata-rata	0,005	0,098	0,089	0,193	0,1933	-0,0005	

Sumber : Laporan Keuangan dan Laba Rugi KBI (2012)
Keterangan : L = Finansial loss; α = Biaya administrasi dan supervise; I = Biaya pokok pinjaman

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa KBI hanya mencapai kondisi viabelpada tahum 2010, sedangkan pada tahun 2009 dan 2011 kondisi finansial KBI tidakviabel. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat komponen biaya operasional yang cukup besar dan berfluktuatif setiap tahunnya, yaitu beban bagi hasil (i). Nilai beban bagi hasil terendah dimiliki KBI pada tahun 2010 karena pada tahun tersebut KBI memperoleh modal luar yang bersifat bantuan dari Yayasan Peramu sehingga tidak membebankan bagi hasil. Sedangkan pada tahun 2011, KBI memperoleh pembiayaan sindikasi dari lembaga BMT dan BPRS dibawah naungan Yayasan Peramu serta Bank Syariah Mandiri (BSM) yang menetapkan sistem bagi hasil. Adapun beban bagi hasil yang ditetapkan oleh pembiayaan sindikasi dan BSM secara berturut-turut

adalah sekitar 15 persen dan 14 persen. Besarnya biaya pinjaman ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan biaya operasional KBI pada tahun 2009 dan 2011 meningkat, sehingga KBI tidak viabel.

Biaya administrasi dan supervisi KBI tergolong stabil dengan rata-rata 0,09 persen. Artinya, KBI membutuhkan biaya transaksi sebesar Rp 0,09,- untuk setiap unit pinjaman. Biaya transaksi terdiri dari gaji petugas, biaya transportasi dan akomodasi, serta biaya rupa-rupa persediaan. Komponen pembentuk viabilitas yang tergolong baik yaitu *finansial loss*. Hal ini dapat dilihat dari persentase tunggakan pembayaran anggota yang hanya bernilai rata-rata 0,51 persen. Nilai tersebut menggambarkan tingkat pengembalian pembiayaan KBI sangat baik dan lancar. Prestasi ini merupakan salah satu keberhasilan KBI dalam melakukan pendekatan terhadap anggota melalui majelis-majelis, yaitu dalam hal pendampingan yang dilakukan olehTPL setiap minggu. Selain itu, pola *Grameen Bank* KBI dinilai memudahkan anggota dalam pengembalian pembiayaan karena dilakukan setiap minggu pada saat pertemuan majelis sehingga anggota tidak perlu mengunjungi kantor KBI.

Nilai marjin pembiayaan yang ditetapkan merupakan hasil kesepakatan antara petugas TPL dengan anggota dalam suatu akad. Marjin pembiayaan yang ditanggung anggota juga mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan anggota. Didasari dari prinsip bahwa adil tidak harus berarti sama, maka KBI memberikan marjin pembiayaan yang beragam kepada anggotanya, yaitu berkisar antara 17 persen hingga 33 persen per tahun dengan rata-rata 19,3 persen per tahunnya. Nilai rata-rata tersebut masih berada dibawah bunga yang diberikan oleh lembaga pembiayaan pesaing yaitu Mitra Bisnis Keluarga (MBK) yang menetapkan bunga *flat* sebesar 20 persen.

Kondisi keuangan KBI tergolong tidakviabel pada tahun 2009 dan 2011. Kondisi tersebut diakibatkan biaya pokok pinjaman pada kedua tahun tersebut sangat besar. Namun, selisih perhitungan antara marjin pembiayaan dan besarnya biaya operasional masih tergolong rendah,yakni sekitar -0,0005 persen. Oleh karena itu KBI masih dimungkinkan untuk mencapai tingkat viabilitas finansial pada periode berikutnya. Beberapa langkah yang dapat ditempuh KBI untuk mencapai viabilitas finansial, yaitu:

a. Meningkatkan efisiensi TPL dalam meningkatkan jumlah anggota, sehingga penyaluran pembiayaan per TPL menjadi lebih besar. Kondisi tersebut dalam jangka panjang dapat menurunkan biaya operasional setiap rupiah yang disalurkan.
b. Meningkatkan besar plafon pembiayaan kepada anggota yang berkualitas. Peningkatan besar plafon tersebut tidak hanya mengurangi biaya operasional TPL, tetapi juga dapat meningkatnya marjin pembiayaan yang diterima KBI, sehingga dapat meningkatkan efisiensi biaya untuk setiap rupiah yang disalurkan.
c. Memperoleh pinjaman dana dari lembaga yang menetapkan bagi hasil yang lebih rendah, salah satunya adalah Yayasan Peramu. Oleh karena itu, KBI harus dapat meningkatkan prestasinya sehingga lembaga penyalur dana memiliki tingkat kepercayaan yang besar dalam hal penyaluran pembiayaan.

4.3.3. Keberlanjutan Peserta

Komponen ketiga dalam keberlanjutanLKM yaitu keberlanjutan peserta. Keberlanjutan peserta ini sama pentingnya dengan keberlanjutan yang lain, bahkan sering kali menjadi isu sentral dalam pengembangan LKM. Keberlanjutan peserta dapat dipengaruhi tetapi juga dapat mempengaruhi keberlanjutan kelembagaan dan finansial. Dengan kata lain, setiap komponen keberlanjutan memiliki keterkaitan yang erat untuk mewujudkan keberlanjutan LKM secara utuh.

Salah satu ukuran penting keberlanjutan peserta yaitu beban pembiayaan yang harus dibayar peserta kepada LKM lebih kecil dari keuntungan usaha yang dibiayai dari pembiayaan LKM. Oleh karena itu diperlukan analisis keragaan usaha yang dilakukan oleh peserta dikaitkan dengan perolehan pembiayaan.

Berdasarkan kelompok jenis usaha, peserta KBI sampel dibedakan menjadi peserta yang memiliki usaha budidaya (*on farm*) dan usaha memiliki usaha *off farm*. Jenis usaha *on farm* meliputi usahatani tanaman, ternak, dan atau ikan. Sedangkan jenis usaha *off farm* meliputi usaha dagang hasil pertanian, warung sembako, dan industri hasil pertanian. Peserta yang memiliki usaha *on farm* sebanyak 32 orang dan hanya 8 orang yang memiliki usaha *off farm.* Usaha *on farm* yang banyak dilakukan yaitu usahatani tanaman, sedangkan usaha *off farm* yang paling banyak yaitu usaha dagang hasil pertanian.

Realisasi pembiayaan yang diperoleh peserta *on farm* relatif lebih kecil dibandingkan peserta *off farm* (Tabel 6). Secara nominal realisasi pembiayaan per peserta rata-rata 917 ribu rupiah dengan variasi yang cukup besar yaitu antara 500 ribu rupiah sampai 3 juta rupiah. Proporsi realisasi pembiayaan cukup besar yaitu mencapai 94 persen dari nominal pengajuan pembiayaan. Marjin pembiayaan yang harus dibayarkan peserta rata-rata 27 persen per 50 minggu atau sekitar 26 persen per tahun (Tabel 6). Marjin pembiayaan untuk peserta *on farm* relatif lebih besar dibandingkan dengan peserta *off farm*. Hal ini menunjukkan bahwa usaha *on farm* masih dinilai lebih berisiko dibandingkan usaha *off farm*.

Tabel 6. Pengajuan dan Realisasi Pembiayaan untuk Peserta menurut Jenis Usaha pada Koperasi Baytul Ikhtiar Tahun 2012

Variabel	Satuan	Jenis Usaha		
		On Farm	*Off Farm*	Total
Realisasi pembiayaan	Rp	903.125,00	975.000,00	917.500,00
Pengajuan pembiayaan	Rp	996.875,00	1.062.500,00	1.010.000,00
Realisasi/Pengajuan	%	94,27	94,17	94,25
Marjin Pembiayaan	Rp	228.125	250.625	232.625
	%	28	24	27
Lama jadi anggota	Tahun	2,69	1,88	2,53
Frek pembiayaan	Kali	2,75	2,13	2,63

Tabel 6 juga menunjukkan bahwa pesertao*n farm* maupun *off farm* sudah memperoleh pembiayaan dari KBI lebih dari dua kali (rata-rata 2,63 kali). Namun demikian, waktu lama menjadi anggota ternyata lebih pendek dari frekuensi pembiayaan. Artinya, peserta sudah melunasi pengembalian pembiayaan sebelum batas waktu pembiayaan, yaitu sebelum 50 minggu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja peserta tersebut relatif baik, jika dilihat dari kelancaran pembayaran, keaktifan menabung, dan keadaan usaha yang dibiayai. KBI tidak akan memberikan pembiayaan ulang kepada peserta yang memiliki kinerja tidak baik. Berdasarkan kondisi tersebut, maka keberlanjutan peserta KBI dapat dikatakan viabel.

Demikian halnya jika dilihat dari kinerja usaha peserta juga menunjukkan kondisi yang baik. Peserta rata-rata memiliki aset usaha yang cukup besar, mencapai 66 juta rupiah, dan aset usaha *on farm* lebih besar dibandingkan usaha *off farm* (Tabel 7). Komponen nilai aset yang paling besar yaitu nilai aset lahan. Rata-rata luas lahan yang diusahakan sekitar 2,679 meter.Selain aset, omzet usaha peserta rata-rata cukup besar, mencapai 42,8 juta rupiah per tahun. Omzet usaha *off farm* lebih besar, hampir 20 kali lipat dibandingkan dengan omzet usaha *on farm.* Demikian halnya keuntungan usaha *off farm* lebih besar hampir 7,3 kali dibandingkan usaha *on farm* (Tabel 7).

Tabel 7. Keragaan Usaha yang Dilakukan Peserta Pembiayaan KBI menurut Jenis Usaha Tahun 2012

Variabel	Satuan	Jenis Usaha		
		On Farm	*Off Farm*	Total
Aset Usaha	Rp	69.746.250	52.187.500	66.234.500
Aset RT	Rp	40.675.469	44.997.500	41.539.875
Total Aset	Rp	110.421.719	97.185.000	107.774.375
Omzet	Rp/thn	8.980.250	178.362.500	42.856.700
Luas Lahan	Meter	2.542	3.225	2.679
Pendapatan bersih	Rp/thn	3.735.206	26.739.000	8.335.965

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Koperasi Baytul Ikhtiar (KBI) menyelenggarakan pembiayaan berbasis syariah dengan mengadopsi pola *Grameen Bank*. Kinerja KBI dalam penyaluran pembiayaan relatif baik dan cenderung meningkat, baik jumlah pembiayaan maupun jumlah anggota yang dilayani.Peningkatan jumlah pembiayaan 57 persen per tahun, sedangkan jumlah anggota yang dilayani meningkat 37 persen per tahun. Sebagian besar (53%) alokasi pembiayaan untuk kebutuhan konsumsi. Sektor produktif yang paling banyak dijangkau oleh pembiayaan KBI yaitu sektor perdagangan.
2. KBI sudah memiliki keberlanjutan kelembagaan dan peserta. Namun demikian, belum memiliki keberlanjutan finansial. Viabilitas finansial KBI masih negatif pada tahun 2009-2011. Keberlanjutan finansial sangat penting untuk tercapainya keberlanjutan KBI dalam jangka panjang.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan bahwa KBI belum memiliki viabilitas financial, maka perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan berikut:

1. Meningkatkan efisiensi TPL dalam meningkatkan jumlah anggota koperasi. Dengan meningkatnya jumlah anggota, maka penyaluran pembiayaan oleh tiap petugas menjadi lebih besar. Kondisi tersebut dalam jangka panjang dapat menurunkan biaya operasional setiap rupiah yang disalurkan.
2. Meningkatkan besar plafon pembiayaan kepada anggotayang berkualitas sehingga dapat mengurangi biaya operasional TPL sekaligus meningkatkan marjin pembiayaan yang diterima koperasi. Kondisi ini dapat meningkatkan efisiensi biaya untuk setiap rupiah yang disalurkan.
3. Memperoleh pinjaman dana dari lembaga yang menetapkan bagi hasil yang lebih rendah, salah satunya adalah Yayasan Peramu. KBI juga harus dapat meningkatkan prestasinya sehingga lembaga penyalur dana memiliki tingkat kepercayaan yang besar dalam hal penyaluran pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Hoff, K, A. Braverman, dan J. Stiglitz. 1993. The Economics of Rural Organization. Theory, Practice, and Policy. Published for The Word Bank. Oxford University Press.

Khandker, S.R, B. Khaliliy and Z. Khan. 1995. Grameen Bank : Performance and Sustainability. World Bank Discussion Papers 306. The World Bank, Washington D.C.

Maulana, I. 2002. Menuju Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Sehat dan Berkelanjutan (*Sustainable*). Jakarta.

Sulaeman, S. 2004. Analisis Manfaat Lembaga Keuangan Berbentuk Koperasi (KSP/USP). Jurnal Ekonomi dan Bisnis 2, (9): 75-78.

Syukur, M. 2002. Analisis Keberlanjutan dan Perilaku Ekonomi Peserta Skim Kredit Rumahtangga Miskin. Disertasi. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.

Syukur, M dkk. 2000. Peningkatan Peranan Kredit dalam Menunjang Agribisnis di Pedesaan. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.

Thoha, M. 2000. Pemberdayaan Usaha Kecil melalui Model Grameen Bank. Jakarta, PEP – LIPI.

Wijono, W.W. 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Desember : 1-2. Jakarta.

Yunus, M. 2007. Bank Kaum Miskin (Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan). Terjemahan. Marjin Kiri. Depok. Jakarta.

DEPARTEMEN AGRIBISNIS
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
JL. KAMPER. WING 4 LEVEL 5, KAMPUS IPB DRAMAGA BOGOR
TELP (0251) 8629654

ISBN 978-979-19423-8-6